PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP SAS (*SELF ASSESSMENT SYSTEM*) (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees)

Nico Prasetiya Wahyu

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112-114 Bandung
nicoprasetyaa@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research due to the impact of the increasing number of problems in the implementation of tax planning is illegal and violate applicable legislation and policies on taxation which has been issued by the government are not implemented properly by the taxpayer so that tax collection is based on SAS (Self Assessment System) is not going well and can not increase state revenues, especially in the tax sector.
This study used a descriptive and verification. The study population is an individual taxpayer is registered in small taxpayers office Bandung Karees. The sample in this study was 70 respondents individual taxpayers and using simple random sampling. The model used in this study is a model of Structural Equation Modeling (SEM) based components or variance which is known as Partial Least Square (PLS).
The results indicate tax planning significant and positively associated with SAS (Self Assessment System) and tax policy are also significant and positively associated with SAS (Self Assessment System). The results showed that the tax planning and tax policy and a significant positive impact on the SAS (Self Assessment System).

Keywords: Tax Planning, Tax Policy and Self Assessment System

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan definisi pajak bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontrasepsi*) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1991).

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang utama dalam APBN, lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN merupakan penerimaan dari sektor pajak dan pemerintah menjadikan pajak sebagai tulang punggung atau pilar utama penerimaan negara (Waluyo, 2008). Hakekat pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak (Waluyo, 2008).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* (Mohammad Zain, 2009).

Dalam *self assessment system* Wajib Pajak dianggap melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur, padahal kelemahan sistem ini adalah Wajib Pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Hekinus Manao, 2010). Dalam *self assessment system* wajib pajak bisa saja berbohong tentang melaporkan pajaknya, akan tetapi kantor pajak sudah mempunyai sistem yang baik untuk pengawasan, yaitu dengan dengan memeriksa dari bukti-

bukti seperti SPT (Luky Alfirman, 2010). Dalam pelaporan SPT terdapat kebiasaan wajib pajak yang seharusnya membayar tepat waktu tapi wajib pajak tersebut malah membayar pada hari terakhir, sehingga terjadi penumpukan proses dan melewati batas pelaporan (Darmin Nasution, 2007).

Salah satu upaya wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan manajemen pajak, tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi manajemen pajak salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (Erly Suandy, 2011**)**. Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Erly Suandy,2011**)**..

Perencanaan pajak pribadi atau *tax planning* adalah upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak secara legal (Manuel Pakpahan, 2010). Perencanaan pajak dianggap sangat lumrah karena pajak dianggap sebagai biaya, sehingga untuk meminimalisir biaya tersebut perlu dilakukan berbagai upaya atau strategi tertentu dan bagaimana agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan akhirnya akan memperoleh keuntungan serta likuiditas yang diharapkan (Manuel Pakpahan, 2010). Tetapi pada kenyataanya banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak merencanakan pajak dengan benar, misalnya pada saat penyerahan faktur pajak oleh wajib pajak dan setelah diperiksa ulang oleh Ditjen Pajak, transaksinya tidak pernah ada (Bambang Heru Ismiarso, 2010).

Salah satu motivasi yang mendasari perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, salah satunya yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, dan dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak (Erly Suandy, 2011).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang mengoptimalkan penggunaan teknologi, dengan menggunakan sistem komputerisasi diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pajak (Rusli Yusuf, 2012). Adanya keleluasaan wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri (*self assessment*) secara manual disebutkan menjadi penyebab rendahnya realisasai pajak, sebab dengan cara ini sangat memungkinkan terjadi penyelewengan terhadap nominal pajak yang harus dibayar, terlihat jelas bila penarikan pajak yang dilakukan masih jauh dari harapan (Rusli Yusuf, 2012). Adanya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan komputerisasi, dengan *e-filing* wajib pajak dipermudah untuk membayar pajaknya dan soal keamanan data, data SPT langsung masuk ke bank data sehingga lebih aman (Agus Budi Santoso, 2013). Adanya *e-filing* diharapkan akan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya dan tidak ada alasan lagi wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya (Agus Budi Santoso, 2013).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kebijakan Pajak Berpengaruh Terhadap *Self Assessment System*".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi pada masalah ini adalah :

1. Perencanaan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.
2. Kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik.
3. SAS (*Self Assessment System*) yang dilaksanakan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah

1.2.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan **:**

1. Seberapa besar pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Self Assessment System*.
2. Seberapa besar pengaruh Kebijakan Pajak terhadap *Self Assessment System*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami teori-teori dan asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Serta untuk mengetahui perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap *Self Assessment System* di KPP Karees, Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari berbagai masalah yang telah dikemukakan diatas. tujuan peneliti penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perencanaan Terhadap *Self Assessment System* KPP Karees, Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap *Self Assessment System* KPP Karees, Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut. Kegunaan tersebut antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memecahkan masalah pada penerapan perencanaan pajak yang legal dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan tentang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah agar diterapkan dengan baik oleh wajib pajak sehingga pemungutan pajak yang berdasarkan SAS (*Self Assessment System*) dapat diterapkan dengan baik guna meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor pajak**.**

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak dan kebijakan pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.
2. Bagi Peneliti Lain
   Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pajak

2.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:6) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

2.1.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:11), motivasi yang mendasari dilakukanya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan Pajak
2. Undang-undang perpajakan
3. Administrasi perpajakan

2.1.3 Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:8), aspek administratif dari kewajiban perpajakan adalah Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak

2.1.4 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:9) aspek material dalam perencanaan pajak adalah Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.2 Kebijakan Pajak

2.2.1 Pengertian Kebijakan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan pajak adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Perumusan Kebijakan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) perumusan kebijakan pajak dibuat pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Konstitusi suatu negara pun selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui regulasi administrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang pajak pasti tidak bisa mengatur seluruh aspek perpajakan maka perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur atau membuat kebijakan perpajakan

2.2.3 Jenis Pajak Yang akan Dipungut

Menurut Erly Suandy (20011:11), sistem perpajakan modern ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung dan cukai seperti :

1. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi
2. Pajak atas keuntungan modal (*capital gains*)
3. Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk
5. Pajak atas undian/hadiah
6. Bea materai
7. *Capital transfer taxes/transfer duites*
8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya

2.3 *Self Assessment System*

2.3.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* adalah Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.3.2 Kewajiban Pajak *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) adalah :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak,
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak,
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak,
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Perencanaan pajak, Kebijakan pajak, dan *Self Assessment System* adalah masalah yang diangkat oleh peneliti untuk diteliti. Sering kali peneliti mendengar bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikan target penerimaan pajak. Target ini sangat sulit dicapai andai tidak ada dukungan dari para pemangku kepentingan, mengingat sistem perpajakan saat

ini adalah *self assessment system*. Dengan sistem ini masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak dipersilahkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak pribadinya.

Dengan diberlakukannya *self assessment system* bisa saja wajib pajak tidak jujur dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan sistem pajak itu juga wajib pajak bisa dengan leluasa untuk merencanakan kewajiban pajaknya agar pajak yang akan dibayarkan bisa diminimalkan.

Perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak tersebut rata – rata adalah wajib pajak yang kewajiban pajaknya sangat besar. Misalnya pada saat penyerahan faktur pajak oleh wajib pajak orang pribadi dan setelah diperiksa ulang oleh Ditjen Pajak, transaksinya tidak pernah ada. Perencanaan pajak yang dilakukan tidak sesuai dan melanggar peraturan pemerintah atau Undang – undang pajak yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah terus mengeluarkan kebijakan – kebijakan pajak yang terbaik untuk memaksimalkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah biasanya berupa peraturan atau Undang – undang pajak yang baru. Kebijakan – kebijakan tersebut biasanya mengundang pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Banyak pihak – pihak dari wajib pajak yang tidak setuju karena mereka menilai kebijakan – kebijakan tersebut kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama kewajibannya dalam sistem perpajakan *self assessment system* tersebut. maka target penerimaan pajak yang ditargetkan sulit untuk tercapai.

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sementara adalah:

1. Terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap *self assessment system*.
2. Terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap *self assessment system*.

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati (2010:29) menerangkan bahwa Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti adalah Perencanaan Pajak, Kebijakan Pajak dan *Self Assessment System*.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti perlu menetapkan metode yang akan dipakai agar mempermudah langkah-langkah penelitian sehingga masalah dapat diselesaikan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan metode penelitian verifikatif. Menurut Sugiyono (2005:21) dalam Umi Narimawati (2010:29) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. sementara metode verifikatif menurut Masyhuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalm perencanaan dan pelaksanaan penelitian Moh. Nazir (2003:84). Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati (2010:30) yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi;
3. Menetapkan rumusan masalah;
4. Menetapkan tujuan penelitian;
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori;
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan;
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data;
8. Melakukan analisis data;
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah individu, dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. *Time Horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one shoot* atau *cross sectional*. Definisi *One shoot* atau *cross sectional* menurut Uma Sekaran (2006:177) adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Explanatory Survey.* Adapun definisi *Explanatory Survey* menurut Suharsimi Arikunto (2006:8) adalah suatu survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan desain dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Desain Penelitian

3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga terhadap kredit yang disalurkan, maka operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer. Peneliti menggunakan data primer karena peneliti mengumpulkan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

3.5 Alat Ukur Penelitian

3.5.1 Uji Validitas

Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah *validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure.*

Suatu alat ukur disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan variabel perencanaan pajak (X1) , kebijakan pajak (X2) dan *self assessment system* (Y).

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43), Uji reabilitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang

menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditujukan oleh suatu angka yang disebut koefesien reliabiltas, walaupun secara teoritis besarnya koefisien berkisar antara 0,00-1,00 dan juga dapat bertanda positif (+) maupuan negatif (-). Dalam hal reliabilitas, koefesien yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif.

3.6 Populasi dan Penarikan Sampel

3.6.1 Populasi

Pada umumnya dalam sebuah penelitian para peneliti membutuhkan apa yang disebut populasi. Menurut Umi Narimawati (2008:161) populasi adalah Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Karees, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees 78.587 orang.

3.6.2 Sampel

Definisi sampel menurut Sugiyono (2011:120) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi yang banyak, maka harus dilakukan teknik pengambilan *sampling* yang tepat. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *simple random sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengertian *simple random sampling* menurut Sugiyono (2011:126) adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \rightarrow n = \frac{78.587}{1 + 78.587\ (10\%)^2} = \frac{78.587}{786,87} = 99,8 = 100$$

(Sumber : Umi Narimawati, 2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Dari perhitungan diatas, diperoleh sempel sebesar 100 responden. Dalam penelitian ini ditetapkan sempel sebesar 70 responden, karena dengan alasan jumlah tersebut dianggap bisa mewakili total populasi yang diambil secara acak

3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Kuisioner menurut Umi Narimawati (2010:40), Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya, Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini

3.8 Metode Pengujian Data

3.8.1 Metode Analisis

Metode Analisis menurut Umi Narimawati (2010:41), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode verifikatif, sebelum kuisioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristrik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur pengumpulan data penelitian.

1. Analisis deskriptif atau Kualitatif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh perencanan pajak dan kebijakan pajak terhadap *self assessment system*. Menurut Umi Narimawati (2010:245) Langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban yang menggambarkan peringkat jawaban.
b. Dihitung total skor setiap variabel / subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua jawaban responden
c. Dihitung skor setiap variabel / subvariabel = rata-rata dari total skor
d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan tentang kriteria penilaian sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2010:45)

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuisioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

2. Analisis Verifikatif

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (*SEM*) yang berbasis *component atau variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square (PLS)*. Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini hanya 70 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling* (*SEM*) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*. Menurut Imam Ghozali (2006:18) *partial least square* (PLS) adalah metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi,data tidak harus berdistribusi normal multivariate dan ukuran sampel juga tidak harus besar, walaupun *partial least squar*e digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. pengujian dengan *partial least square (PLS)* diterapkan untuk memperoleh hasil pengolahan yang mampu mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Merancang model struktural
b. Merancang model pengukuran
c. Mengkontruksi diagram jalur
d. Konversi diagram jalur kedalam bentuk persamaan
e. Estimasi
f. Uji kecocokan model (*Goodness Of Fit*)

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengujian terhadap hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu Perencanaan pajak dan Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System***.**

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalu uji hipotes statistik sebagai berikut :

Ho : $\gamma_{1.1} = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan
Ho : $\gamma_{1.2} \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan
Ho : $\gamma_{2.1} = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan
Ho : $\gamma_{2.1} \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah : $t = \frac{\hat{\gamma}_{3i}}{SE(\hat{\gamma}_{3i})}$

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan.Dimana t tabel untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

a. Pengujian secara parsial
   Hipotesis
   H_{01}; $\gamma_{1.1}$=0,Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap *Self Assessment System.*
   H_{11} ; $\gamma_{1.1} \neq 0$, Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.
   H_{02} ; $\gamma_{2.1} = 0$, Kebijakan Pajak tidak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.
   H_{12} ; $\gamma_{2.1} \neq 0$, Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.
   Kriteria Pengujian
   - Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (1,96) maka H_0 ditolak, berarti Ha diterima.
   - Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (1,96) maka H_0 diterima, berarti Ha ditolak

b. Pengujian Secara Simultan
   Hipotesis
   H_0 ; γ & β = 0, Secara simultan Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak tidak berpengaruh terhadap *Self Assessment System.*
   H_1 ; γ & $\beta \neq 0$, Secara simultan Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.
   Kriteria uji: H_0 ditolak apabila Fhitung > dari Ftabel (α = 0,05)

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil data kuesioner yang diberikan kepada 70 orang responden wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees dan dilengkapi dengan hasil wawancara dan sumber lainnya yang mendukung analisa hasil penelitian yang dilakukan.

4.1.1 Karateristik Responden

Tabel 4.1
Karateristik Responden

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Perencanaan Pajak

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Perencanaan Pajak

Total skor tanggapan responden untuk 3 indikator Perencanaan Pajak diperoleh sebesar 665 (63,3%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup. Artinya wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees telah memiliki perencanaan pajak yang cukup baik. Ini berarti wajib pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Kebijakan Pajak

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Kebijakan Pajak

Total skor tanggapan responden untuk 5 indikator Kebijakan Pajak diperoleh sebesar 1316 (62,7%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup. Artinya wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees menilai kebijakan pajak sudah cukup baik dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi *Self Assessment System*

Total skor tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk SAS (*Self Assessment System*) sebesar 67,8% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya Wajib Pajak memberikan penilaian sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya sudah cukup baik di KPP Karees.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak terhadap *Self Assessment System*

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan ajak terhadap *Self Assessment System* peneliti mengunakan *Structural Equation Modelling* (*SEM*) pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

Gambar 4.1
Diagram jalur model lengkap

Model persamaan struktural untuk pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap *Self Assessment System* dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 0{,}382X_1 + 0{,}505\ X_2 + 0{,}357}$$

4.1.3.2 Pengujian Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel Perencanaan Pajak

Tabel 4.5
Outer Model Variabel Perencanaan Pajak (X_1)

Bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten Perencanaan Pajak (X_2) adalah menganalisis informasi yang ada ($X_{1.1}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten perencanaan pajak (X_2) diikuti dengan mencari kelemahan rencana pajak ($X_{1.3}$) dan mengevaluasi perencanaan pajak ($X_{1.2}$).

2. Model Pengukuran Variabel Kebijakan Pajak

Tabel 4.6
Outer Model Variabel Kebijakan Pajak (X_2)

Bobot faktor yang paling besar diantara 5 indikator variabel laten kebijakan pajak (X_2) adalah tujuan ($X_{2.1}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten kebijakan pajak (X_2) diikuti dengan proposal ($X_{2.2}$), efek ($X_{2.5}$), keputusan ($X_{2.4}$), dan program ($X_{2.3}$).

3. Model Pengukuran Variabel *Self Assessment System*

Tabel 4.7
Outer Model Variabel *Self Assessment System* (Y)

Bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel *Self Assessment System* (Y) adalah pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak (Y_3). Indikator ini memberikan kontribusi paling

besar dalam membentuk variabel laten *Self Assessment System* (Y) diikuti dengan menghitung pajak oleh wajib pajak (Y_1) dan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Y_3).

4.1.3.3 Pengujian Model Struktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *convergent validity, discriminan validity,* dan *composite reliability*. Hasil penilaian untuk model pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

1. ***Convergent Validity***

   Hasil perhitungan Nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model yang diteliti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Nilai *Convergent validity* Variabel Perencanaan Pajak, Kebijakan Pajak dan *Self Assessment System*

2. ***Discriminan Validity***

   Discriminan validity melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingakan dengan konstruk yang lainnya. Untuk konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebagai berikut :

Tabel 4.9
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel Laten

3. ***Composite Reliablity***

   Untuk ketiga konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan yaitu perencanaan pajak, kebijakan pajak dan *Self Assessment System*, diperoleh Nilai *Composite Reliability* sebagai berikut **:**

Tabel 4.10
Nilai *Composite Reliability* Variabel Laten

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis

1. **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Self Assessment System***

Tabel 4.11
Uji Signifikansi Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Besarnya pengaruh langsung perencanaan pajak terhadap *self assessment system* adalah (0,382×0,382×100%) = 14,6%. Jadi perencanaan pajak memberikan pengaruh 14,6% terhadap *self assessment system* jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh perencanaan pajak secara tidak langsung terhadap *Self Assessment System* karena adanya hubungan dengan kebijakan pajak sebesar (0,382×0,624×0,505×100%) = 12,1%. Besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap *self assessment system* sebesar 26,7%.

2. **Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap *Self Assessment System***

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap SAS (*Self Assessment System*)

Besarnya pengaruh langsung kebijakan pajak terhadap s*elf assessment system* adalah (0,505×0,505×100%) = 25,5%. Jadi kebijakan pajak memberikan pengaruh 25,5% terhadap *self assessment system* jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh kebijakan pajak secara tidak langsung terhadap *self assessment system* karena adanya

hubungan dengan perencanaan pajak adalah (0,505×0,624×0,382×100%) = 12,1%. Besarnya pengaruh kebijakan pajak terhadap *self assessment system* diperoleh sebesar 37,6%.

Hasil pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap *self assessment system*) wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pajak terhadap s*elf assessment system* lebih besar dibandingkan pengaruh perencanaan pajak. Besar pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap *self assessment system* diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.13
Besar Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak terhadap *Self Assessment System*

Besar pengaruh koefesien jalur perencanaan pajak terhadap *self assessment system*) adalah sebesar 0,382 dan berpengaruh langsung sebesar 14,6%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 12,1%. Total besar pengaruh perencanaan pajak terhadap *self assessment system* adalah sebesar 26,7%.

Sedangkan besar pengaruh koefesien jalur kebijakan pajak terhadap *self Assessment system* adalah sebesar 0,505 dan berpengaruh langsung sebesar 25,5%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 12,1%. Total besar pengaruh perencanaan pajak terhadap *self assessment system* adalah sebesar 37,6%. Total pengaruh secara simultan perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap *self assessment system* adalah sebesar 64,3%

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Hasil nilai t_{hitung} variabel perencanaan pajak terhadap *self assessment system* diperoleh sebesar 3,975. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} maka disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *self sssessment system*. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara perencanaan pajak terhadap *self assessment system*.

Korelasi perencanaan pajak dengan *self assessment system*) adalah sebesar 0,698 dan koefisien determinan perencanaan pajak dengan *self assessment system*) adalah sebesar 26,7%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat.

4.2.2 Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Hasil nilai t_{hitung} variabel kebijakan pajak terhadap *self assessment system* diperoleh 6,327. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} maka disimpulkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kebijakan pajak terhadap *self assessment system*.

Korelasi kebijakan pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 0,744 dan koefisien determinan kebijakan pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 37,6%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap *self assessment system* dan secara keseluruhan wajib pajak melakukan perencanaan pajak yang cukup baik. Ini berarti wajib pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Masalah yang terjadi pada *self assessment system* terjadi karena wajib pajak tidak sepenuhnya menganalisis informasi yang ada untuk merencanakan pajaknya. Wajib pajak juga tidak sepenuhnya mengevaluasi perencanaan pajaknya dengan benar sehingga wajib pajak juga tidak sepenuhnya bisa mencari kelemahan rencana pajak yang sebelumnya telah ditetapkan.

2. Kebijakan pajak berpengaruh terhadap *self assessment system* dan masalah yang terdapat pada *self assessment system* terjadi karena tujuan dari kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak memberikan kesejahteraan. Terkait dengan perencanaan kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah dinilai cukup adil tetapi perlu perubahan agar bisa lebih baik lagi kedepannya. Terkait dengan program yang ditetapkan pemerintah wajib pajak menilai sudah cukup adil, tetapi perlu juga perubahan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah selalu dilaksanakan. Terkait dengan keputusan dari kebijakan pajak, wajib pajak menilai keputusan mengenai kebijakan pajak tersebut cukup memberatkan. Terkait dengan efek kebijakan pajak, wajib pajak cukup merasakan adanya efek dari kebijakan pajak tersebut, akan tetapi dengan perubahan yang lebih baik lagi wajib pajak akan dapat merasakan efek dari kebijakan pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan *self assessment system* yang berlaku, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan. Untuk memahami peraturan yang berlaku maka perlu sering diadakannya penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan juga lebih digiatkan pemeriksaan pajak yang mendalam agar perencanaan pajak yg ilegal dapat segera diatasi.
2. *Self assessment system* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan mendalam agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Perlu juga adanya kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan kepada masyarakat. Kebijakan yang dibuat perlu mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya dengan meninjau kembali kebijakan pajak yang dikeluarkan, agar wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

5.2.2 Saran Akademis

1. Saran Bagi Pengembang Ilmu
   Diharapkan agar para pengembang ilmu melakukan penelitian yang sama agar dapat lebih memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak dan kebijakan pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*
2. Saran Bagi Peneliti Lain
   Diharapkan agar peneliti lain melakukan penelitian yang sama dan menggukan metode yang sama dengan unit analisis dan sampel yang berbeda, supaya hasil dari penelitian tersebut dapat mendukung teori yang sudah ada agar dapat diteliti secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Budi Santoso. 2013. *Bayar Pajak Lewat E-Filling Lebih Mudah & Nyaman*. Diakses Pada Jumat, 22 Februari 2013 11:36 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2013/02/22/20/765839/bayar-pajak-lewat-e-filling-lebih-mudah-nyaman.

Ahmad Yani. 2011. *Strategi Pemberantasan Mafia Pajak*. Diakses Pada Kamis, 27 Januari 2011 dari *World Wide Web* : http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8799&Itemid=48.

Anshari Ritonga. 2010. *Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak*. Diakses Pada Rabu, 06 Oktober 2010 10:11 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2010/10/06/20/379584/ini-dia-alasan-masyarakat-tolak-bayar-pajak.

Babel Adinur Prasetyo. 2011. *Tarif Pajak UMKM Turun 50%*. Diakses Pada Rabu, 12 Oktober 2011 dari *World Wide Web* : http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9762&Itemid=48.

Bambang Heru Ismiarso. 2010. *Modus Penghindaran Pajak Semakin Kreatif*. Diakses Pada Rabu, 27 Januari 2010 16:35 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2010/01/27/20/298281/modus-penghindaran-pajak-semakin-kreatif.

Barker, C. Pistrang., & Elliot, R. (2002). *Research Methods in Clinical Psychology (2nd ed.*). Chichester: John Wiley & Sons

Burton, Richard. 2011. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin. 2011. *A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia*. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (7) : 881-888, 2011 - ISSN 1991-8178.

Crumbley D. Larry ,Friedman Jack, Anders Susan B, *Dictionay of Tax Term***,** New York : Barron's Bussiness guides.

Dame Situmorang. 2011. *Wah, Isi SPT Pajak pun Ada Kelasnya*. Diakses Pada Kamis, 10 Maret 2011 07:57 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2011/03/10/20/433286/wah-isi-spt-pajak-pun-ada-kelasnya.

Darmin Nasution. 2007. *Kebiasaan WP Bayar Pajak Mepet Waktu*. Diakses. Pada Sabtu, 29 Desember 2007 15:45 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2007/12/29/20/71373/kebiasaan-wp-bayar-pajak-mepet-waktu.

Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak (Edisi Kedua)*. Jakarta : Salemba Empat

_____. 2011. *Perencanaan Pajak*, *Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.

Erwin Eka Kurniawan. 2013. *RI Anut Kebijakan Budgeter Negatif*. Diakses Pada Minggu, 30 Juni 2013 16:44 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2013/06/30/20/829715/ri-anut-kebijakan-budgeter-negatif.

Fredrick Choi and Gery K. Meek. 2010. *Akuntansi Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.

Fuad Rahmany. 2011. *Ditjen Pajak Menenggarai Perusahaan Tambang Tak Jujur Bayar Pajak*. Diakses Pada Jumat, 28 Oktober 2011 dari *World Wide Web*:http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9818&Itemid=48.

_____. 2013.*Ditjen Pajak Siapkan 16 Langkah Strategis di 3 Bidang Untuk Amankan Pajak 2013.* Diakses Pada Selasa, 15 Januari 2013 - 14:53 dari *World Wide Web* : http://www.pajak.go.id/content/news/ditjen-pajak-siapkan-16-langkah-strategis-di-3-bidang-untuk-amankan-pajak-2013

Gunadi. 2004. *Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan*. Diakses Pada 17 Mei 2004 dari *World Wide Web* : http://www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm

_____. 2010. *Pajak Disarankan Lakukan Evaluasi*. Diakses Pada Jum'at, 15 Oktober 2010 08:06 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2010/10/15/20/382720/pajak-disarankan-lakukan-evaluasi.

Hair, J. F. et. al. (2006). *Multivariate Data Analysis*. Sixth Edition. Pearson Education, Inc. New Jersey. United State of America.

Harun Al Rasyid. 1994. *Tekhnik Sampling dan Penskalaan*. Bandung : Universitas Padjajaran.

Hasan. 2004. *Analisis Dana Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara

Hekinus Manao. 2010. *Self assessment tutupi kekurangan SDM pajak*. Diakses Pada Sabtu,28 Agustus 2010 dari *World Wide Web* : http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8157&Itemid=48.

Hatta Rajasa. 2011. *Sensus Pajak Jadi Penentu Policy Pajak*. Diakses Pada Jum'at, 30 September 2011 14:17 WIB dari *World Wide Web* :

http://economy.okezone.com/read/2011/09/30/20/509084/hatta-sensus-pajak-jadi-penentu-policy-pajak.
Ibnu Subiyanto. 2000. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.
Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
John M. Echols and Hassan Sadily. 2000. *Kamus Inggris Indonezia An English-Indonesia Dictionary.* Jakarta: PT. Gramedia.
Juni Pranoto dan Adam I.Indrawijaya. 2011. *Strategi Pembaharuan Administrasi dan Manajemen Publik.* Bandung: Alfabeta.

Kristina Murphy and Karen Byng. 2002. *Preliminary Findings From'The Australian Tax System Survey Of Tax Scheme Investors'.* ISBN 0 642 76839 0, ISSN 1444-8211
Luky Alfirman. 2010*. Wah..Isi Penghasilan Wajib Pajak Bisa Dibohongin*. Diakses Pada Selasa, 29 Juni 2010 14:50 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2010/06/29/20/347793/wah-isi-penghasilan-wajib-pajak-bisa-dibohongin.
Lyon Susan M. 1996. *Intenasional Tax Glossary*, 3rd editan, IBFD publications BV.
Maftuchan. 2013. *Hanya Pengusaha yang Diuntungkan Paket Kebijakan*. Diakses Pada Rabu, 11 September 2013 15:33 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2013/09/11/20/864396/hanya-pengusaha-yang-diuntungkan-paket-kebijakan.
Mansuri, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Yayasan Pengembang dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
Manuel Pakpahan. 2010. *Pajak Pribadi Juga Harus Jadi Perhatian Kita*. Diakses Pada Senin, 4 Januari 2010 08:48 WIB dari *World Wide Web :* http://economy.okezone.com/read/2010/01/04/315/290545/pajak-pribadi-juga-harus-jadi-perhatian-kita.
Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta.
Moeheriono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik.* Jakarta: Rajawali Pers
Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
_____. 2009. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
Mohd Rizal Palil*.* 2010. *Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia*.
Nur Hidayat. 2005. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
Nur Indriantoro. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar perpajakan*. Jakarta : Yayasan Obor.
Peter White, Anne Cronin, Christian Anderson, Dianna Smith. 2004. *The Australian Taxation Office's Management of Aggressive Tax Planning*. The Auditor - General, Audit Report No.23 2003–04, Performance Audit - ISSN 1036 – 7632, ISBN 0 642 80750 7
Prasetyo Atmosutidjo. 2013. *Pajak UMKM Ancam Pengusaha Kecil*. Diakses Pada Rabu, 12 Juni 2013 17:09 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2013/06/12/20/820960/pajak-umkm-ancam-pengusaha-kecil.
Riduwan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, *Cetakan 4*. Bandung : Alfabeta.
Rochmat Soemitro. 1991. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum.* Bandung : Eresco.
Rusli Yusuf. 2012. *Masih Gunakan Sistem Manual - Picu Anjloknya Pendapatan Pajak*. Diakses Pada Jumat, 22 Juni 2012 dari *World Wide Web* : http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10385&Itemid=48.
Sakli Anggoro. 2011. *Ayo Tertib Pajak.* Diakses Pada Rabu, 03 Augustus 2011 dari *World Wide Web* : http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9506&Itemid=48.

Sasmito Hadinagoro. *2012. Tolak Bayar Pajak, Ancaman APPI ala Revolusi Prancis*. Diakses Pada Jum'at, 06 Juli 2012 11:02 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2012/07/06/20/659650/tolak-bayar-pajak-ancaman-appi-ala-revolusi-prancis.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu, dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sophar Lumbantoruan. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Grasindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta : Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifudin Hasan. 2013. *Menkop Usul Usaha Mikro Tidak Kena Pajak*. Diakses Pada Kamis, 10 Januari 2013 16:22 WIB dari *World Wide Web* : http://economy.okezone.com/read/2013/01/10/320/744257/menkop-usul-usaha-mikro-tidak-kena-pajak.

Timbul Hamonangan Simanjutak. 2009. *Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian Di Jawa Timur.* Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol.1 No.2 2009.

Tjiptardjo. 2012. *Tax Ratio Indonesia 15,7 Persen.* Diakses Pada Minggu, 5 Desember 2010 08:59 WIB dari *World Wide Web* : http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/08595088/function.simplexml-load-file.

Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo.

Uma Sekaran. 2006. *Research Methods For Business*, Edisi 4, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* Universitas Komputer Indonesia : Bandung.

_____.2010. *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Genesis : Jakarta.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. Penulisan *Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi : Genesis.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia (Edisis Keenam)*. Jakarta : Salemba Empat.

_____. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Yenni Mangoting. 1999. *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1
Desain Penelitian

	Desain Penelitian			
	Jenis penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	***Time Horizon***
T-1	*Deskriptif & verifikatif*	*Explanatory Survey*	Wajib Pajak Orang Pribadi	*Cross Sectional*
T-2	*Deskriptif & verifikatif*	*Explanatory Survey*	Wajib Pajak Orang Pribadi	*Cross Sectional*

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Konsep variable	Indikator	Skala	Item
Perencanaan Pajak (X_1)	Perencanaan pajak adalah Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak Erly Suandy (2011:6)	1. Menganalisis informasi yang ada 2. Mengevaluasi perencanaan pajak 3. Mencari kelemahan rencana pajak Erly Suandy (2008:13)	Ordinal	1 2 3
Kebijakan Pajak (X_2)	Kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Siti Kurnia Rahayu (2010:90)	1. Tujuan (*goal*) 2. Proposal (*plain*) 3. Program 4. Keputusan 5. Efek Siti Kurnia Rahayu (2010:8)	Ordinal	4 5 6 – 7 8 9
SAS (*Self Assessment System)* (Y)	Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Siti Kurnia Rahayu (2010:101)	1. Menghitung pajak oleh wajib pajak 2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak 3. Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak Siti Kurnia Rahayu (2010:103)	Ordinal	10 - 11 12 - 13 14 - 15

Tabel 4.1
Karateristik Responden

Jenis Kelamin	**Jumlah**	**Persentase**
Laki-laki	51	72,8 %
Perempuan	19	27, 2 %
Pendidikan	**Jumlah**	**Persentase**
S2	1	1,4 %
S1	26	37,2 %
D3	19	27,2 %
Lain-lain	24	34,2 %
Umur	**Jumlah**	**Persentase**
20 - 30 Tahun	26	37,2 %
31 - 40 Tahun	21	30 %
41 - 50 Tahun	12	17,1 %
51 Tahun Keatas	11	15,7 %

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Perencanaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menganalisis informasi yang ada	207	350	59.1%	Cukup
2	Mengevaluasi perencanaan pajak	260	350	74.3%	Baik
3	Mencari kelemahan rencana pajak	198	350	56.6%	Cukup
Total		665	1050	63.3%	Cukup

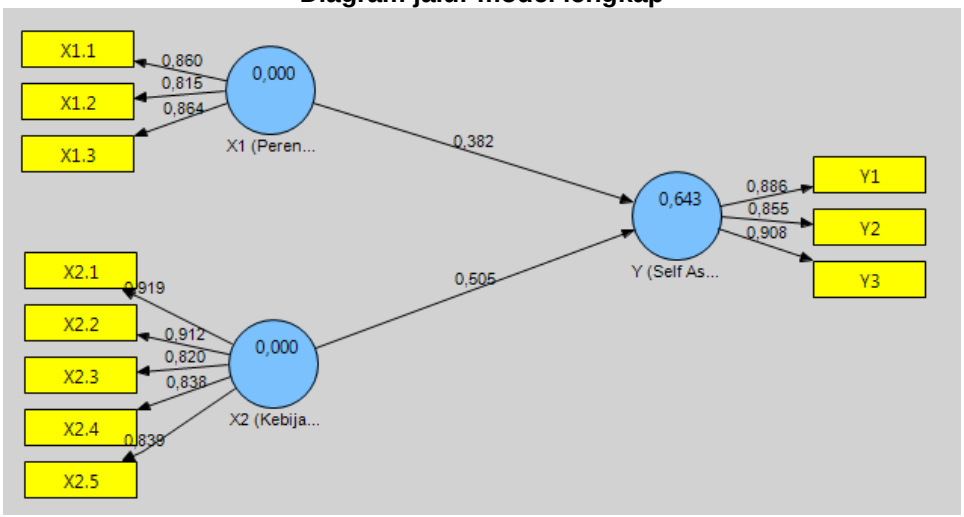
Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Kebijakan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tujuan	214	350	61.1%	Cukup
2	Proposal	205	350	58.6%	Cukup
3	Program	458	700	65.4%	Cukup
4	Keputusan	226	350	64.6%	Cukup
5	Efek	213	350	60.9%	Cukup
Total		1316	2100	62.7%	Cukup

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi SAS (*Self Assessment System*)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menghitung pajak oleh wajib pajak	467	700	66.7%	Cukup
2	Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak	459	700	65.6%	Cukup
3	Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak	498	700	71.1%	Baik
Total		1424	2100	67.8%	Cukup

Gambar 4.2
Diagram jalur model lengkap



Tabel 4.5
Outer Model Variabel Perencanaan Pajak(X_1)

Variabel Manifes	Loading Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Menganalisis informasi yang ada ($X_{1.1}$)	0,860	$X_{1.1}$= 0,860X_1+ 0,261	20,666
Mengevaluasi perencanaan pajak ($X_{1.2}$)	0,815	$X_{1.2}$= 0,815X_1+ 0,336	15,630
Mencari kelemahan rencana pajak ($X_{1.3}$)	0,828	$X_{1.3}$= 0,828 X_1+ 0,253	14,498

Tabel 4.6
Outer Model Variabel Kebijakan Pajak(X_2)

Variabel Manifes	Loading Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Tujuan ($X_{2.1}$)	0,919	$X_{2.1}$= 0.919X_2+ 0,156	29,789
Proposal ($X_{2.2}$)	0,912	$X_{2.2}$= 0.912X_2+ 0,168	28,544
Program ($X_{2.3}$)	0,820	$X_{2.3}$= 0.820X_2+ 0,328	16,613
Keputusan ($X_{2.4}$)	0,838	$X_{2.4}$ = 0.838 X_2+ 0,298	19,710
Efek ($X_{2.5}$)	0,839	$X_{2.5}$ = 0.839X_2+ 0,296	15,898

Tabel 4.7
Outer model variabel SAS (*Self Assessment System*) (Y)

Variabel Manifes	Loading Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Menghitung pajak oleh wajib pajak (Y_1)	0,886	Y_1= 0,886Y+ 0,216	31,725
Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Y_2)	0,855	Y_2= 0,855Y+ 0,269	20,735
Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak (Y_3)	0,908	Y_3= 0,908 Y+ 0,176	31,437

Tabel 4.8
Nilai *Convergent validity* Variabel Perencanaan Pajak, Kebijakan Pajak dan *Self Assessment System*

	Perencanaan Pajak	Kebijakan Pajak	*Self Assessment System*
X1.1	0,860	0,542	0,624
X1.2	0,815	0,500	0,530
X1.3	0,864	0,542	0,611
X2.1	0,524	0,919	0,640
X2.2	0,540	0,912	0,646
X2.3	0,567	0,820	0,640
X2.4	0,582	0,838	0,634
X2.5	0,491	0,839	0,659
Y1	0,562	0,661	0,886
Y2	0,633	0,643	0,855
Y3	0,651	0,666	0,908

Tabel 4.9
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel laten

Variabel	AVE
Perencanaan Pajak(X_1)	0,717
Kebijakan Pajak(X_2)	0,751
Self Assessment System (Y)	0,780

Tabel 4.10
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

Variabel	*Composite Reliability*
Perencanaan Pajak (X_1)	0,883
Kebijakan Pajak (X_2)	0,938
SAS (*Self Assessment System*) (Y)	0,914

Tabel 4.11
Uji Signifikansi Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap SAS (*Self Assessment System*)

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,382	3,975	1,645	Signifikan

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap SAS (*Self Assessment System*)

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,505	6,327	1,645	Signifikan

Tabel 4.30
Besar Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak terhadap SAS (*Self Assessment System*)

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Perencanaan Pajak	0,382	14,6%	12,1%	26,7%
Kebijakan Pajak	0,505	25,5%	12,1%	37,6%
Total Pengaruh Secara Simultan				**64,3%**